



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON
TAHUN 2021 - 2026**

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 12

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta nomenklatur Perangkat Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Cilegon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappedalitbang.
- (2) Perubahan ...

- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - i. Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - q. Inspektorat;
 - r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - s. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - t. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
 - u. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - x. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - y. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - z. Sekretariat Daerah;
 - aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - bb. Kecamatan ...

- bb. Kecamatan Jombang;
 - cc. Kecamatan Purwakarta;
 - dd. Kecamatan Cilegon;
 - ee. Kecamatan Citangkil;
 - ff. Kecamatan Grogol;
 - gg. Kecamatan Cibeber;
 - e. hh. Kecamatan Ciwandan; dan
 - ii. Kecamatan Pulomerak.
- (3) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 memuat konsep dan rencana kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021-2026.
- (4) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

BAB ...

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 10 April 2023

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 12

KATA PENGANTAR

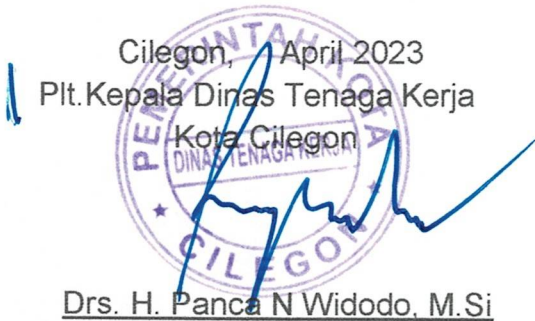
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 telah dapat tersusun. Pada prinsipnya dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan pembangunan daerah Kota Cilegon pada bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 -2026.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Dengan selesainya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan bidang urusan Ketenagakerjaan Kota Cilegon

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026. Semoga kedepan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan Kota Cilegon

Cilegon, April 2023
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon


Drs. H. Panca N Widodo, M.Si
NIP. 19690907 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Cilegon.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
BAB III.....	31
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	31
PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	35
3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota	38
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	45
BAB IV	47
TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja kota Cilegon	47
BAB V	49
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	49
BAB VI	51
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII	84
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII.....	86
PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Nominatif Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon	1
Tabel 2.2 Tabel Rekapitulasi Daftar Aset	14
Tabel 2.3 Tabel Pencapaian Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon 2016 - 2020	15
Tabel 2.4 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah	18
Tabel 2.5 Tabel Target Renstra Disnaker Kota Cilegon dan Provinsi Banten	20
Tabel 3.1 Tabel Indikator Ketenagakerjaan Kota Cilegon	32
Tabel 3.2 Tabel Realisasi Sasaran dan Misi 1 Kota Cilegon 2016 - 2020	33
Tabel 3.3 Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	34
Tabel 3.4 Faktor Penghambat Pencapaian Visi misi 2021 - 2026	37
Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKDP	48
Tabel 5.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	50
Tabel 6.1 Tabel Rencana Program kegiatan dan Pendanaan	51
Tabel 6.2 Tabel Rencana Program Prioritas Disnaker Kota Cilegon	82
Tabel 7.1 Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perubahan ini melibatkan seluruh jajaran unit organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon sehingga penyempurnaannya dapat merupakan representasi dari seluruh unit di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon sebab dokumen Renstra ini akan menjadi acuan semua unit jajaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon dalam merencanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 2021-2026.

Perkembangan Pembangunan Kota Cilegon sampai dengan saat ini telah berdasarkan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dapat dicapai, keseluruhan hasil-hasil pembangunan tersebut, tentunya tidak lepas dari konsep perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana daerah, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Terkait dengan upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan maka pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon

Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030. Dokumen Perencanaan Daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahun maupun tahunan.

Selain itu evaluasi ini juga diperlukan untuk penyusunan rencana percepatan pencapaian sasaran, dengan melihat sejauh mana masalah yang dihadapi dapat terselesaikan hingga saat ini. Upaya untuk mengakomodasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, wujud respon Pemerintah Kota Cilegon terhadap implementasi kebijakan pemerintah pusat dan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 pada pasal 284 dimana perubahan RPJMD dilakukan karena adanya perubahan target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah salah satunya adalah pencapaian target sasaran infrastruktur.

Sebagaimana wujud implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026. RPJMD Kota Cilegon menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040;
13. Peraturan Walikota Cilegon nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Lembara Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 nomor 70);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam Program-program penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan secara profesional.
- 2) Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang Ketenagakerjaan.
- 3) Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggung jawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*.
- 4) Sebagai bahan laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan Kota Cilegon adalah untuk :

- 1) Menjelaskan Visi, Misi , tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan Kota Cilegon yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026.
- 2) Menjelaskan uraian Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan sumber pembiayaan dari APBD/APBN Kota Cilegon.
- 3) Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kepala Dinas setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan **(input)**, keluaran **(output)**, dan hasil **(outcome)**).

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021–2026 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Issue-Issue Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. Tujuan Dan Sasaran

BAB V. Strategi Dan Kebijakan

BAB VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Cilegon, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten serta Instansi/Lembaga terkait lainnya. Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Cilegon tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi penduduk.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Dengan terbitnya Undang-Undang di atas maka terjadinya perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Dengan terjadinya perubahan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan maka terjadinya perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur Dinas dan bidang kerja. Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja Bidang Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja berganti nama menjadi Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Hubungan Industrial berganti menjadi bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sedangkan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi sehingga Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;

4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon (Perwal) nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja maka Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.;
- 2) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.;
- 3) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.;
- 4) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
- 5) Pelayanan antar kerja di Daerah;
- 6) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
- 7) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah;
- 8) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah;
- 9) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;dan
- 10) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah;
- 11) pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten, Sekda sesuai bidang tugasnya

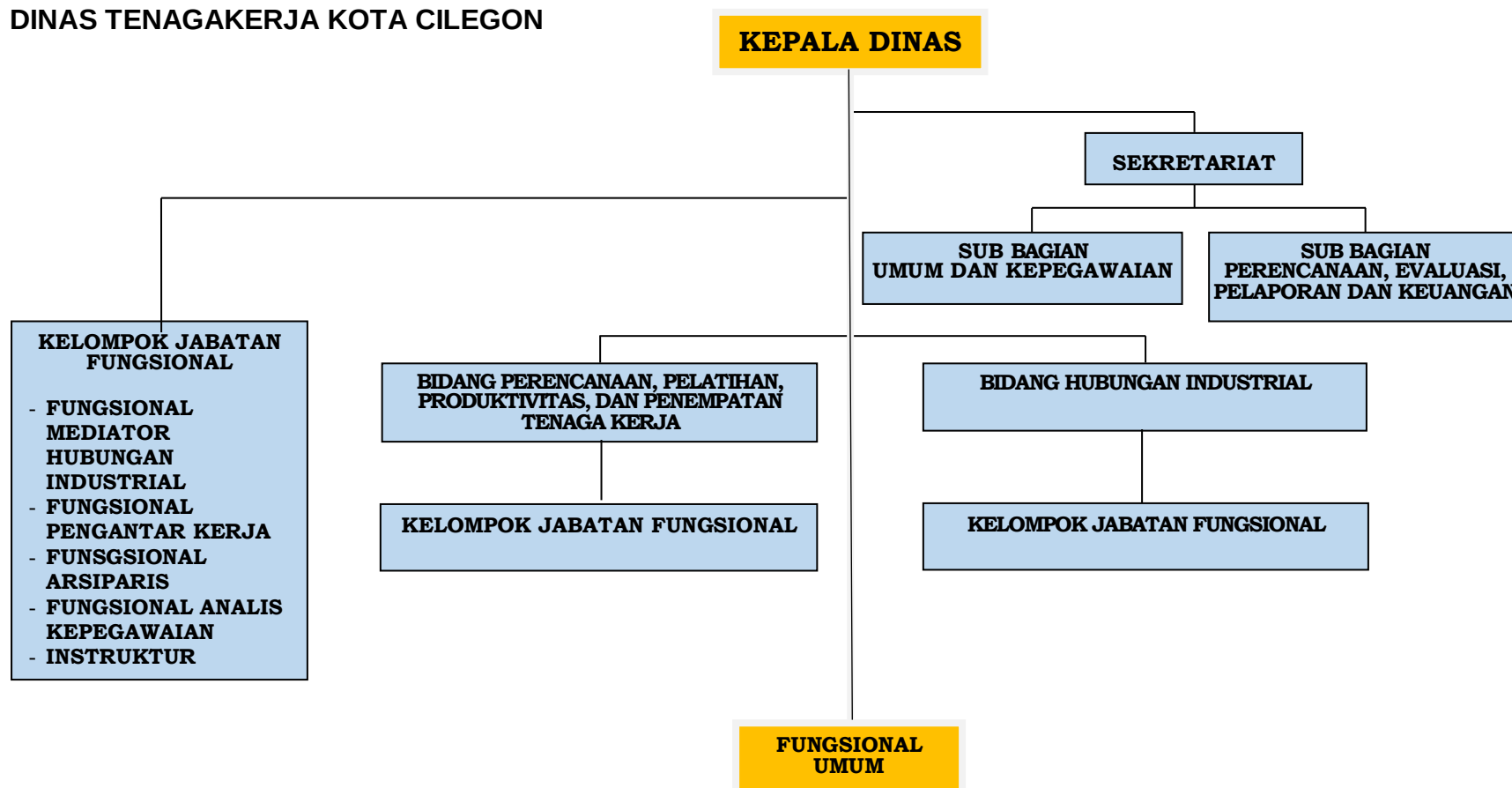
Sedangkan susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

5. UPTD Latihan kerja
6. Kelompok Jabatan Fungsional , yang terdiri dari:
 - Fungsional Pengantar Kerja
 - Mediator Hubungan Industrial
 - Arsiparis
 - Instruktur
 - Analis Kepegawaian

GAMBAR 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGAKERJA KOTA CILEGON**



2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Di samping faktor eksternal, terdapat pula beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Keberadaan sumber daya Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Perangkat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya itu harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi SDM yang berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai.

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 49 orang terdiri atas ASN sebanyak 30 orang dan Honorer terdiri dari : TTK 3 orang serta THL sebanyak 16 orang dan.

Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Berdasarkan Nominatif dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1.
Berdasarkan Nominatif Pegawai Dinas Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Jumlah Pegawai dirinci menurut golongan :		
	a. Golongan IV	6	
	b. Golongan III	22	
	c. Golongan II	2	
	d. Golongan I	-	
	e. Non PNS		
2.	Jumlah Pegawai menurut Kualitas pendidikan :		
	a. S-2	8	
	b. S-1	18	
	c. D-III	3	
	d. SLTA	1	
	e. SLTP	-	
3.	f. SD	-	
	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan Struktural :		
	a. Eselon II	-	
	b. Eselon III	3	
	c. Eselon IV	4	
4.	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan		
5.	Jabatan Fungsional	15	
6.	Jumlah PNS keseluruhan	30	
7.	Jumlah Non PNS :		
	a. TKK	3	
	b. THL	16	
Jumlah (6+7)		49	

B. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Perangkat daerah. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Daftar Aset
Keadaan per Agustus 2023

No	Kode Jenis	Nama Jenis Barang	Jumlah	Harga Perolehan
1	1.3.1	Tanah	1	Rp. 7.375.000.000
2	1.3.2	Peralatan Mesin	1522	Rp. 11.273.124.748
3	1.3.3	Gedung Bangunan	15	Rp. 7.414.709.873
4	1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	19	Rp. 877.105.800
5	1.3.5	Asset Tetap Lainnya	62	Rp. 10.228.900
6	1.5.3	Asset Tidak Berwujud	2	Rp. 68.370.000
7	1.5.4	Asset Lainnya	1	Rp. 44.500.000
TOTAL			1622	Rp. 27.063.039.321

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Cilegon

2.3.1. Analisa RPJMD 2016-2021

Dalam rangka Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, maka sesuai peran Dinas Tenaga Kerja untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing harus bertolak dari kondisi umum ketenagakerjaan di Kota Cilegon.

Pembangunan pada tahun 2016-2021 yang mana telah di amanatkan dalam RPJMD Kota Cilegon merupakan awal dari perencanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Hal ini merupakan cara untuk memetakan suatu permasalahan yang akan datang yang kemudian dijadikan suatu arah pembangunan kepala daerah terpilih dan diambil untuk langkah-langkah kebijakan strategis dalam perencanaan strategis pembangunan.

Permasalahan dan isu yang terjadi pada masyarakat Kota Cilegon yang berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sehingga perangkat daerah harus mampu mengolah dan menyelenggarakan sebagaimana tugas dan fungsinya.

Sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan strategis tahun 2021-2026, hasil pembangunan sebagai pijakan dalam mengambil suatu keputusan dalam menyusun rencana strategis, berikut dibawah ini tingkat capaian kinerja dinas Tenaga Kerja periode 2016 - 2021:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon 2016-2020

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SPM	IKK (*)	TAR GET INDI KAT OR LAIN NYA	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian Kinerja Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60%	-	-	92,14%	75%	75%	80%	80%	67,5%	76%	65%	67,7%	52,2%	71,18%	101%	86,6%	84,6	65,25%
2	Persentase tenaga kerja peserta Pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan, diterima bekerja maupun berwirausaha	-	-	-	88%	45%	45%	50%	50%	100%	46%	28,75%	25,3%	64%	113%	102%	63,88%	50,6%	128%
3	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	-	-	48,5%	45%	45%	45%	45%	10%	17,68%	38,2%	23,3%	13,83%	20,59%	39%	84,8%	52,2%	30,7%
4	Besaran pekerja/buruh yang Menjadipeserta program Jamsostek/ BPJS	50%	60%	-	71,17%	60%	60%	60%	60%	65%	69,94	73,63%	77,9%	78,4%	91,33%	117%	122,7%	130%	130,4%
5	Proporsi Sarana Hubungan Industrial	-	-	-	11,29%	12%	12%	12%	12%	18,67%	33,5%	47,45%	21,8%	45,7%	165%	279%	381,2%	181,6%	380,8%
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	-	-	88%	67%	70%	70%	80%	73,52%	83%	82,85%	88%	78,8%	83,54%	123,8%	118,3%	126%	98,5%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 6 Indikator target kinerja urusan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terdiri dari 6 indikator RPJMD/IKK dan merupakan indikator 4 indikator SPM. Berdasarkan evaluasi hasil perencanaan pada urusan ketenagakerjaan, dari 6 indikator yang terdiri 6 indikator RPJMD sebanyak 3 indikator telah tercapai, dan 3 indikator target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu :

1. Tingkat Penempatan Tenaga Kerja

Capaian kinerja Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sebesar 30,7% dimana dari target kinerja sebesar 45% masih kurang sebesar 14,3%. Target tidak tercapai karena

- a. Jumlah pencari kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja,
- b. Industri di kota Cilegon pada umumnya industri padat modal yang berorientasi pada sistem dan mesin-mesin yang canggih, sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak,
- c. Pendidikan masyarakat yang sesuai dengan formasi penempatan kerja masih terbatas.

Mengacu pada target SPM sebesar 45% dengan realisasi 30,7% artinya pencari kerja yang ditempatkan, capaian pada tahun 2020 kota cilegon masih dibawah SPM.

Sedangkan indikator lainnya pada urusan ketenagakerjaan, indikator telah tercapai targetnya, yaitu:

1. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

Capaian kinerja sebesar besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebesar 65,25%, dimana dari target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 52,2%, Mengacu pada target SPM sebesar 80% dengan realisasi 52,2% maka pada tahun 2020 kinerjanya masih dibawah SPM.

2. Persentase tenaga kerja peserta Pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan, diterima bekerja maupun berwirausaha.

Capaian kinerja Persentase tenaga kerja peserta Pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan, diterima bekerja maupun berwirausaha sebesar 128%, dimana dari target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 64%. Target tercapai karena peserta yang telah mendapat

pelatihan menjadi lebih terampil dan mempunyai keahlian yang dibutuhkan perusahaan, sehingga bisa membuka usaha sendiri

3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek/ BPJS.

Capaian kinerja Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek/ BPJS sebesar 98,5%, dimana dari target kinerja sebesar 80%. Target tercapai karena adanya sosialisasi, sehingga banyak perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya untuk menjadi peserta BPJS. Mengacu pada target SPM sebesar 80% dengan realisasi 98,5%, maka tahun 2020 capaian kinerja kota cilegon melebihi SPM.

4. Proporsi Sarana Hubungan Industrial

Capaian Proporsi Sarana Hubungan Industrial sebesar 380,8%, dimana dari target kinerja sebesar 12% dan realisasi sebesar 45,7%. Target tercapai karena sebagian besar perusahaan sudah memenuhi syarat pembentukan sarana hubungan industrial.

5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Capaian kinerja Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebesar 98,5%, dimana dari target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 78,8%.

Target tercapai karena sebagian pada setiap kasus yang ditangani berdasarkan kasus yang dilaporkan petugas mediasi dapat memediasi antara pelapor dan terlapor. Adapun sebagian kasus ada yang bersifat naik pada pengadilan dan di mediasikan oleh managmen perusahaanya.

Mengacu pada target SPM sebesar 50% dengan realisasi 78,8%. maka pada tahun 2020 kota cilegon melebihi SPM.

Table 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Uraian	Anggaran Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Dukungan Pelayanan Pemerintah	2.274.069.250	1.657.736.500	2.214.248.000	3.357.175.197	2.629.812.306	2.073.225.573	1.540.252.219	2.044.289.184	3.081.203.010	2.446.856.829	91,2%	93%	92,32%	92%	93,04%	2.426.608.251	2.237.165.363
Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja	4.419.856.500	3.772.939.000	2.734.737.000	4.665.179.000	2.903.190.000	3.977.482.100	3.518.201.720	2.571.142.265	2.629.812.306	925.065.500	89,99%	93,52%	94%	86,15%	31,86	3.699.180.300	2.724.340.778
UPT BLK	-	1.205.000.000	820000000	50.000.000	-	-	906.298.640	788.810.000	48.000.000	-	-	75,21%	96,2%	96%	-	691.666.667	581.036.213
Program Peningkatan Hubungan Industrial	376.900.000	715.325.000	880.000.000	979.680.000	298.100.000	363.940.000	620.119.000	805.612.500	706.669.650	79.915.000	96,56%	86,69%	91,5%	72,13%	26,81%	650.001.000	515.251.230

Berdasarkan tabel diatas tersebut, target anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2020, dapat dihitung pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran yang mana setiap program ada yang mengalami pertumbuhan + (positif) dan pertumbuhan – (negative), yakni :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintah

Pada program dukungan pelayanan pemerintah anggaran tahun 2016 Rp.2.274.069.250,- dan anggaran tahun 2020 Rp.2.446.856.829,-, pertumbuhan anggaran meningkat 7,5% sedangkan pada realisasi anggaran meningkat 2 % dari 91,02% menjadi 93,04 %.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terjadi penurunan anggaran sebesar 48 %, pada anggaran tahun 2020 dibandingkan tahun 2016, anggaran tahun 2016 Rp.4.419,856,500,- tahun 2020 Rp. 2.903.190.000,-

Kurangnya realisasi karena masih adanya tersisa anggaran kegiatan yang belum terlaksana sebesar 68,14%.

3. Program Peningkatan Hubungan Industrial sebesar

Pada program ini pertumbuhan anggaran meningkat 20%, meningkatnya pertumbuhan pada program ini karena meningkatnya jumlah kegiatan untuk menunjang program ini. sedangkan realisasi anggaran hanya 28,81% pada tahun 2020.

4. UPTD. LK

Pada tahun 2020 UPT. Latihan Kerja tidak mendapatkan anggaran kegiatan (0%).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih relative dapat diatas atau dilampaui namun dengan adanya hal tersebut tantangan merupakan suatu yang dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan arah pengambil keputusan kebijakan yang bertujuan menjadikan peluang sebagai langkah kebijakan.

Penyusunan perubahan rencana strategis ini tidak terlepas dari rencana strategis kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Banten. Penyusunan rencana strategis harus memperhatikan rencana pembangunan pada Tingkat Pusat dan Provinsi yang bertujuan menjadi pembangunan yang bersinergitas untuk memperoleh pembangunan yang berintegrasi.

2.4.1. Analisis Renstra Provinsi Banten

Tabel 2.5
Target Renstra Dinas tenaga Kerja Provinsi Banten dan
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

INDIKATOR PROGRAM DISNAKER PROVINSI BANTEN	INDIKATOR PROGRAM DISNAKER KOTA CILEGON
(1)	(2)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja	
Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja	Besaran LPK yang mendapatkan pembinaan
Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan
Capaian Kesempatan Kerja	
Capaian Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
	Jumlah perusahaan yg telah memiliki Sarana Hubungan Industrial
Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Berdasarkan komparasi indikator pembangunan diatas Kota Cilegon terhadap Pemerintah Provinsi Banten bidang Urusan ketenagakerjaan terdapat kesamaan arah pembangunan. Dengan searahnya pembangunan tersebut maka Kota Cilegon dimudahkan dalam koordinasi dalam bentuk teknis maupun dukungan dalam alokasi sumber pendanaan, sehingga memudahkan Kota cilegon meningkatkan dan pengembangan pembangunan.

2.4.2. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, Visi Kementerian Ketenagakerjaan adalah **“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF DAN SEJAHTERA”**

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
2. Peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi;
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi;
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan;
5. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan;
6. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pemerintahan yang baik good governance, yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif;

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam agenda ini peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi salah satu aspek pembangunan yang sangat penting;
- b. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- c. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- d. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Agenda dan Sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan

Agenda dan sasaran pemabangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional.

I. Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional

Agenda prioritas menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran, memiliki sasaran utama menurunkan jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri, sasaran lainnya:

1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran
2. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar
3. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran
4. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi para pekerja migran

Sedangkan sasaran besar lainnya bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai antara lain:

1. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi;
2. Meningkatnya jumlah pekerja formal;
3. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja;
4. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeadilan;
5. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap guncangan lapangan kerja dan upah;
6. Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja;
7. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja;
8. Tersedianya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha;

9. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antar serikat pekerja dan pengusaha;
 10. Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar;
 11. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama;
 12. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industry;
 13. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 14. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri;
 15. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran;
 16. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
 17. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran;
 18. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran
 19. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial;
 20. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat;
 21. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja hingga mendekati sasaran;
2. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan
- Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:
- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
 - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
- c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;
 - Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan;
 - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.
- e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian;
- g. Peningkatan kepuasann stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna.

2.4.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040.

Disebutkan dalam bagian 2 pasal 4 :

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cilegon meliputi :

- a. peningkatan peran kota berbasis Pusat Energi dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- b. peningkatan peran kota berbasis industri, perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- c. pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan kawasan andalan Bojonegara-Merak- Cilegon;
- d. pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan berskala regional;
- e. pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Cilegon;
- f. penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah;
- g. penetapan RTH sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Cilegon;
- h. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- i. pengembangan sarana dan prasarana Kota Cilegon;
- j. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- k. pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal;
- l. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pedestrian;
- m. pengembangan dan pengendalian kawasan budi daya; dan
- n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dan bagian 3 pasal 7 :

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Cilegon Pasal 5

- a. Kebijakan Peningkatan peran kota berbasis industri, perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan strategi:
1. mengembangkan kawasan perindustrian yang dilengkapi fasilitas atau prasarana minimum;
 2. mengembangkan pelabuhan pengumpul dan terminal untuk kepentingan sendiri yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
 3. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional;
 4. meningkatkan pembangunan sarana prasarana utama dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan merata; dan
 5. menciptakan pelayanan kegiatan nasional yang aman dan nyaman.

Kebijakan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Cilegon dapat di simpulkan adanya dukungan industri di Kota Cilegon yang sekaligus berdampingan dengan Kawasan andalan bojonegara. Oleh karena itu dalam menghadapi tuntutan industri diperlukan persiapan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar industri, kaitan telaahan RTRW dengan renstra Dinas Tenaga Kerja untuk melihat keterkaitan korelasi urusan ketenagakerjaan dengan industri. Adanya korelasi urusan ketenagakerjaan dan industri adalah potensi kondisi eksternal yang mejadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon khususnya Dinas Tenaga Kerja dalam pelayanan perangkat daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Cilegon, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah pencari kerja/penganggur di bursa kerja;
2. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru;
3. Rendahnya kualitas pencari kerja ;

4. Adanya perselisihan Hubungan Industrial, unjuk rasa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
5. Semakin besarnya jumlah penduduk miskin.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahunnya selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan OPD lain di lingkungan Kota Cilegon. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja social masyarakat tingkat kelurahan untuk dapat menangani masalah ketenagakerjaan.

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Walikota.

Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

2. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sebagaimana telah diuraikan di atas pada sub bab 2.2. bahwa potensi sumber daya manusia dilihat pendidikan formal dari jumlah 47 orang pegawai, 28 orang berpendidikan DIII/S1/S2, berarti 60% sdm sudah mumpuni. Dari sisi

pengalaman lebih dari 55% adalah Golongan III dan Golongan IV, dan sebanyak 11 orang adalah pejabat fungsional yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah penting, yaitu aspek sarana, prasarana, dan anggaran setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan dana yang tersedia. Terletak sebagai “Gerbang Investasi” dari ujung pulau Jawa memberikan kemungkinan adanya peningkatan investasi dan tentunya penyerapan tenaga kerja pun memiliki peluang. Terbukanya kesempatan kerja dengan melalui sektor informal

Tantangan

- a. Setiap tahun jumlah pencari kerja bertambah terus sehingga dalam penanganannya perlu dicarikan terobosan – terobosan baru, agar perusahaan – perusahaan yang ada memaksimalkan dalam penerimaan tenaga kerjanya, mengingat bila dilihat dari hasil pengamatan lapangan bahwa setiap perusahaan yang ditinjau belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi. Serta kurangnya sarana dan prasarana bagi peningkatan mutu pencari kerja, produktivitas kerja serta berwirausaha.
- b. Dari hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menggambarkan secara umum masalah yang terjadi dan ternyata masih terdapat beberapa perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan secara utuh.
- c. Belum optimalnya sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan sesuai dengan standar kualifikasi serta belum tersedianya SDM pelatihan sehingga pembinaan peserta pelatihan belum optimal.

Peluang

- a. - Mencari dan menegosiasikan agar perusahaan melakukan penyerapan tenaga kerja secara optimal serta memperhatikan tenaga lokal dalam arti penduduk Kota Cilegon yang mempunyaikemampuan dalam rangka mengurangi pengangguran.
- Menjalin kerjasama dengan PPTKIS yang bergerak di Kota Cilegon untuk penempatan Tenaga Kerja keluar negeri.

- b. - Melaksanakan secara terus menerus dan intensif sosialisasi peraturan Perundang – undangan ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja/buruh.
 - Memberdayakan Serikat Pekerja / Serikat Buruh secara optimal.
 - Mensosialisasikan pembentukan dan pembinaan LKS Bipartit.
 - Memberdayakan peran LKS Tripartit.
 - Mengoptimalkan fungsi Dewan Pengupahan tingkat Kota Cilegon.
 - Mengupayakan agar semua Tenaga Kerja di masukan dalam - kepesertaan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.
 - Mengupayakan agar perusahaan yang wajib memiliki peraturan perusahaan / PKB, agar membuat PP dan PKB
- c. - Meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan pengujian pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, tindakan preventif dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - Mendorong Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan kepada pengusaha yang secara nyata tidak melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan.
- d. Adanya dukungan dari Bapak Walikota diantaranya :
 - Mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan standar lembaga pelatihan kerja dan tuntutan industri.
 - Agar mengembangkan program, sistem dan metode pelatihan kerja untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan produktif.
 - Dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan stakeholder, sebagai upaya penempatan pasca pelatihan dan pembentukan kelompok wirausaha.

Dengan melihat tantangan dan peluang di atas maka kedepannya Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan mengembangkan pelayanan dasar dan pembangunan daerah sebagai berikut :

A. Pelayanan Publik

1. Pelayanan AK-I (Kartu pencari kerja);
2. Pelayanan BKK (Bursa Kerja Khusus);
3. Pelayanan rekomendasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
4. Pelayanan Rekomendasi Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ;
5. Pelayanan izin pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) ;
6. Pelayanan Izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja Swasta (LPTKI);

B. Pembangunan daerah bidang Ketenagakerjaan Kota Cilegon

1. Pelayanan Pelatihan Kerja
2. Pelayanan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Pelayanan Informasi Pasar Kerja
4. Pelayanan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
5. Pelayanan Pemagangan
6. Pelayanan Sertifikasi Kompetensi
7. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
8. Pelayanan Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
9. Pelayanan pendaftaran pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu / aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multidimensional.

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya dan kota cilegon pada khususnya dalam ketenagakerjaan adalah tingginya penganggur terbuka. Disamping masalah pengangguran terbuka yang berpengaruh langsung terhadap kemiskinan dan seandainya masalah pengangguran ini berlanjut dan terus meningkat maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan kota cilegon.

Faktor Internal yang menjadi permasalahan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon antara lain :

1. Minimnya Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan (dalam hal ini tenaga teknis dan fungsional)
2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana (Pelatihan kerja dan Pelayanan Ketenagakerjaan lainnya)
3. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Bidang dan Antar Perangkat Daerah yang terkait Ketenagakerjaan

Sedangkan faktor eksternal yang masih akan dihadapi dalam jangka waktu mendatang yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Ketenagakerjaan Kota Cilegon

Indikator Ketenagakerjaan	Indikator Ketenagakerjaan Kota Cilegon				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,44	63,56	62,68	61,83	61,37
Tingkat Pengangguran Terbuka	11,88	9,33	9,68	12,69	10,13
Tingkat Kesempatan Kerja	88,12	90,67	90,32	87,31	89,87

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cilegon sampai dengan tahun 2020 periode RPJMD 2016 – 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon mencapai 12,69% masih jauh terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 yakni dibawah 7,01%. Sedangkan pada awal periode RPJMD 2021-2026 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon menurun sekitar 2% dari tahun 2020 menjadi 10,13% dimana angka ini melampaui target tahun 2021 sebesar 11,90%.

Tingkat pengangguran terbuka di ukur sebagai persentasi jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator penggguran terbuka ini baik dalam satuan orang maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu perkembangan dapat menunjukan tingkat keberhasilan program ketengakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Sesuai dengan survei angkatan kerja nasional (sakernas) tingkat pengguran terbuka dari empat komponen :

1. Orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan
2. Orang yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha
3. Orang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Orang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 3.2
Realisasi sasaran Misi 1 Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2020

Jenis kegiatan utama	2016	2017	2018	2019	2020
1. Cakupan Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	78,8%	83,54%	123,8%	118,3%	126%
2. Tingkat penempatan tenaga kerja	20,59%	39%	84,8%	52,2%	30,7%

Gambaran data diatas tentang capaian kerja sasaran dari tujuan Misi empat adalah Mewujudkan kesejahteraan yang merata Berdasarkan trend pembangunan dari tahun 2016-2021 bahwa untuk cakupan kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan berdasarkan standar pelayanan minima (SPM) sebesar 50% dan realisasi pada tahun 2020 sebesar 126% artinya sudah 126 % jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, capaian indicator melebihi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada indikator tingkat penempatan tenaga kerja pada tahun 2020 capaian realiasi sebesar 30,7 % sedangkan target SPM 70%, artinya baru 30,7 % pencari kerja yang ditempatkan, ketidaktercapainya ini dikarenakan masih tingginya jumlah pencari kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja.

Dalam rangka penyusunan rencana strategis 2016-2021 kinerja yang di hasilkan Dinas Tenaga Kerja, akan menjadi evaluasi dalam penentuan arah pembangunan pada tahun 2021-2026. Arah pembangunan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja masih terfokus pada pengangguran terbuka di Kota Cilegon. Karena pengangguran terbuka bukan lagi isu Daerah namun menjadi skala nasional dan internasional. Tentunya dalam setiap tahunan trend pertumbuhan pengangguran selalu menunjukan fluktuatif, dari hal ini bagaimana daerah sebagai garda terdepan dalam menghadapi dinamisnya mengentaskan pengangguran yang sekaligus dapat menekan kemiskinan. Pada umumnya Permasalahan pengangguran terbuka penyebab utamanya adalah :

1. Penduduk yang relatif banyak sedangkan lapangan kerja hanya sedikit
2. Pendidikan dan keterampilan rendah sehingga tidak mampu bersaing dan tersisih
3. Angkatan kerja tidak memenuhi syarat yang diminta oleh dunia kerja
4. Teknologi yang semakin modern belum berimbang dengan kemampuan
5. Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi musim

6. Adanya ketidakstabilan perekonomian, politik dan juga keamanan suatu negara

Melihat penyebab utama dari pengangguran terbuka diatas, perlu pemetaan mulai dari masalah hingga akar masalah atau sebab level terendah (dasar) dan akibat (impact) yang menjangkau jangka pendek, menengah sampai dengan jangka Panjang. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berdasarkan permasalahan/kendala yang pernah di hadapi pada tahun-tahun sebelumnya telah mencatat berbagai polemik yang terjadi tentang ketenagakerjaan di indikator pembangunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dijadikan misi pembangunan. Dari catatan tersebut sebagai pelayan daerah merangkum bentuk struktur masalah.

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Pengangguran terbuka	Rendahnya Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	- Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia - Pendidikan dan keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan industri - Masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tentang wajib lapor lowongan
			- Belum optimalnya informasi pelatihan yang diterima oleh masyarakat kota cilegon - Belum optimalnya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dengan kebutuhan industri - Kurangnya tenaga instruktur beberpa pelatihan pada BLK

Pemetaan permasalahan di atas merupakan satu kesatuan atau sebab akibat pada tantangan penanganan pengangguran secara khusus. Rangkaian munculnya masalah pokok sampai dengan akar masalah dimulai dari evaluasi RPJMD 2016-2021 perihal urusan ketenagakerjaan. Dari hasil evaluasi tersebut yang dapat menjadi sasaran atau arah pembangunan dengan rencana strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026, karena akar masalah adalah suatu bagian sebab yang paling mendasar adanya suatu masalah pokok. Fungsi dari Pemetaan masalah ini memudahkan untuk menentukan output (keluaran) dan outcome (hasil/impact) jangka menengah dan Panjang bagi penerima manfaat dan penyelenggara.

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kota Cilegon Kota Cilegon dalam RPJMD 2021-2026 merupakan Visi dan Misi sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Mengingat Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan hasil proses politik, maka visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama perumusan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 -2026.

Visi Kota Cilegon Tahun 2021-2026 adalah

“TERWUJUDNYA CILEGON BARU MODERN DAN BERMARTABAT”

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Cilegon Baru | : | Bahwa pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas. |
| Cilegon Modern | : | Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi. |
| Cilegon Bermartabat | : | Bahwa masyarakat dan pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya. |

Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Cilegon Baru Modern dan Bermartabat” beberapa Misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021 – 2026 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon sebagai berikut :

1. Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang professional dan akuntabel melalui membangun command center, pelayanan publik satu atap berbasis teknologi, menurunkan tingkat korupsi, peningkatan fasilitas infrastruktur, promosi jabatan berdasarkan prestasi dan kompetensi, perizinan satu atap, meningkatkan fasilitas kota yang baik.

2. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui Partisipasi lama sekolah 12 tahun, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatkan akreditasi seluruh sekolah, 100% guru SD dan SMP minimal S1, Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Meningkatkan kelas RSUD menjadi kelas A, Menambah dokter dan tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya hingga ke puskesmas, Meningkatkan fasilitas kesehatan, Ambulance gratis, Tunjangan kematian bagi rakyat miskin, Pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, Puskesmas keliling

4. Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata

Pemerintah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa, selalu berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata melalui Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM), Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor, Membangun iklim investasi yang kondusif, Menjadikan cilegon kota industri dan jasa

5. Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen mewujudkan masyarakat berperadaban melalui membangun cilegon kota pariwisata sejarah, budaya dan religius, membangun visual kota cilegon yang mempesona, Menjamin keamanan, Membangun cilegon sebagai smart city melalui peningkatan Sistem Layanan

Berbasis Elektronik (SPBE) baik layanan pemerintahan maupun layanan publik dan perluasan akses internet di seluruh wilayah serta di area publik dengan pengelolaan yang terintegrasi, Membangun masyarakat yang menguasai IPTEK, Membangun masyarakat yang partisipatif, Membangun ruang publik, Membangun fasilitas bagi penyandang difabel.

Dalam misi dan agenda diatas bahwa Dinas Tenaga Kerja akan melaksanakan pembangunan jangka menengah pada misi empat yaitu **Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata** dengan agenda **Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja**. Berangkat dari misi dan agenda tersebut Dinas Tenaga Kerja merencana rencana kerja strategis dengan program Program Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja Serta Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, dan program Hubungan Industrial.

Untuk menjalankan rencana kerja yang di lakukan perangkat daerah, kesiapan perangkat daerah telah menentukan bahwa adanya faktor penghambat dan faktor pendorong;

Beberapa yang menjadi faktor penghambat menjalankan visi dan misi daerah yaitu :

Tabel 3.4
Faktor penghambat pencapaian visi misi 2021-2026
Dinas tenaga Kerja Kota Cilegon

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
no	uraian	no	uraian
1	Masih kurangnya sarana dan prasarana balai latihan kerja dalam rangka peningkatan mutu dan jumlah kompetensi tenaga terampil	1	Masih kurangnya sosialisasi pemahaman tentang dunia usaha/wirausaha bagi masyarakat dalam rangka mengentaskan pengangguran
2	belum adanya regulasi daerah tentang kerja perekrut ketenagakerjaan penduduk local	2	Jumlah angkatan kerja yang tidak terampil/kompeten yang masih tinggi
3	Masih kurangnya tenaga fungsional Instruktur Pelatihan yang dimiliki	3	Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha
4	Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional Pengantar Kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal	4	Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja
5	Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja.	5	Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja

		6	Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja
		7	Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja.
		8	Regulasi aturan mengenai upah minimum masih belum bisa dijadikan acuan secara permanen

Adapun sebagai faktor pendukung menjalankan visi dan misi daerah adalah :

- 1) Adanya UPTD. Latihan Kerja sebagai sarana pelatihan kerja terampil
- 2) Dukungan Kepala daerah dalam pelatihan tenaga kerja terampil guna menghadapi pasar kerja di Tingkat Nasional yang khususnya Di Kota Cilegon.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Tenaga Kerja ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dansinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi.

- a) apakah capaian sasaran pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegontelah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten atau Renstra Kementrian/Lembaga.
- b) Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten atau Renstra Kementrian/Lembaga
- c) Kinerja Pada renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dapat di sandingkan dengan Kinerja Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Sasaran bidang ketenagakerjaan kementerian ketenagakejaan yang hendak dicapai antara lain:

1. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi;
2. Meningkatnya jumlah pekerja formal
3. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padat pekerja
4. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeadilan
5. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap guncangan lapangan kerja dan upah
6. Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja
7. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja
8. Tersedianya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha
9. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antar serikat pekerja dan pengusaha
10. Diterapkannya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat di perusahaan besar
11. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan utama
12. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri
13. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat
14. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri
15. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran
16. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar
17. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran
18. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran
19. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial

20. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat
21. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja hingga mendekati sasaran

Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
 - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
- c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;
 - Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan;
 - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.
- e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian;

- g. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna.

Sebagaimana indikator kinerja diatas bahwa program kerja lingkungan kementerian tenaga kerja Republik Indonesia dan transmigrasi dan pemerintah provinsi Banten berdasarkan program Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja Serta Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial telah hampir sejalan sehingga kemudahan hubungan kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam arah pembangunan jangka menengah

3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040.

Disebutkan dalam bagian 2 pasal 4:

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cilegon meliputi:

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040.

Disebutkan dalam bagian 2 pasal 4 :

a. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cilegon meliputi :

1. peningkatan peran kota berbasis Pusat Energi dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Peningkatan peran kota berbasis industri, perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
3. Pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan kawasan andalan Bojonegara-Merak- Cilegon;
4. Pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan berskala regional;
5. Pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Cilegon;

6. Penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah;
7. Penetapan RTH sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Cilegon;
8. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
9. Pengembangan sarana dan prasarana Kota Cilegon;
10. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
11. Pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal;
12. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pedestrian;
13. Pengembangan dan pengendalian kawasan budi daya; dan
14. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Cilegon Pasal 5

b. Kebijakan Peningkatan peran kota berbasis industri, perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan strategi:

1. mengembangkan kawasan perindustrian yang dilengkapi fasilitas atau prasarana minimum;
2. mengembangkan pelabuhan pengumpul dan terminal untuk kepentingan sendiri yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
3. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional;
4. meningkatkan pembangunan sarana prasarana utama dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan merata; dan
5. menciptakan pelayanan kegiatan nasional yang aman dan nyaman.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Cilegon Pasal 5

Kebijakan Peningkatan peran kota berbasis industri, perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan strategi:

1. mengembangkan kawasan perindustrian yang dilengkapi fasilitas atau prasarana minimum;
2. mengembangkan pelabuhan pengumpul dan terminal untuk kepentingan sendiri yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
3. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional;
4. meningkatkan pembangunan sarana prasarana utama dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan merata; dan
5. menciptakan pelayanan kegiatan nasional yang aman dan nyaman.

Kebijakan penataan ruang wilayah Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Cilegon dapat di simpulkan adanya dukungan industri di Kota Cilegon yang sekaligus berdampingan dengan Kawasan andalan bojonegara. Oleh karena itu dalam menghadapi tuntutan industri diperlukan persiapan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar industri.kaitan telaahan RT/RW dengan renstra Dinas Tenaga Kerja untuk melihat keterkaitan korelasi urusan ketenagakerjaan dengan industri. Adanya korelasi urusan ketenagakerjaan dan industri adalah potensi kondisi eksternal yang mejadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon khususnya Dinas Tenaga Kerja dalam pelayanan perangkat daerah.

c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menghapus Kemiskinan

Statistik Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Penduduk miskin Kota Cilegon bertambah akibat Pandemi Covid-19. Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin pada 2020 tercatat sebanyak 16.310 ribu atau 3,69 persen dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 13.200 ribu atau 3,03 persen dari jumlah penduduk. Pandemi Covid-19 membuat banyak penduduk kehilangan pekerjaan atau penurunan penghasilan sehingga daya beli menjadi menurun itulah penyebab kemiskinan tahun 2020 meningkat. Sejalan dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, indeks kedalam kemiskinan (P1) yang menggambarkan seberapa jauh pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga mengalami

kenaikan. Akan tetapi Indeks keparahan kemiskinan yang menggambarkan disparitas antar penduduk miskin mengalami penurunan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Pada tahun 2020, garis kemiskinan Kota Cilegon naik sebesar 9,82 persen, yaitu dari 459.469 per kapita per bulan pada 2019 menjadi 504.571 per kapita per bulan pada 2020. Selain kemiskinan, salah satu persoalan di hampir semua negaranegara berkembang adalah persoalan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi tanda bahwa distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah tidak tersebar secara merata. Pada kondisi ini, pendapatan cenderung dinikmati oleh kelompok kaya, sementara kelompok miskin hanya menikmati pendapatan dalam jumlah yang sedikit. Ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk dapat diukur dengan menggunakan Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini bernilai antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan 1 berarti ketimpangan sempurna. Ketimpangan pendapatan Kota Cilegon juga meningkat terlihat dari Indeks Gini dari 0,315 di tahun 2019 menjadi 0,373 di tahun 2020. Dengan nilai yang berkisar antara 0,35-0,50, maka Kota Cilegon terkategori sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan yang sedang. Berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan yang dibuat oleh Bank Dunia, maka terlihat bahwa di tahun 2020, persentase pengeluaran rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,93 persen, yang berarti ketimpangan Kota Cilegon berada pada kategori ketimpangan rendah.

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap penambahan penduduk usia kerja dari tahun ke tahun sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran mengenai besarnya persentase penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masuk ke angkatan kerja. Dalam setahun terakhir TPAK mengalami penurunan dari 62,74 persen menjadi 61,83 persen.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Kota Cilegon. Persentase penduduk yang bekerja menurun yaitu dari 90,32 persen menjadi 87,31 persen, maka pengangguran yang tercermin pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya dari 9.68 persen menjadi sebesar 12,69 persen. Hal tersebut berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 13 orang merupakan pengangguran. Sebanyak 4.436 penganggur dari total penganggur Kota Cilegon yang berjumlah 25.976 jiwa, merupakan pengangguran akibat dari Covid-19. Dampak terbesar terjadi dalam pengurangan jam kerja, yaitu sebesar 32.326 jiwa terdampak, pengurangan jam kerja disebabkan penurunan produksi imbas lesunya permintaan barang dan jasa di Kota Cilegon.

Dalam rangka menghapus kemiskinan yang ada di Kota Cilegon Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan program Pelatihan kerja yang berdasarkan Kompetensi dan Program Pemagangan, seiring dengan misi Walikota Cilegon yang tercantum pada Misi 4 “**MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA**” diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Cilegon dan terjadi kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Pada Bab-bab diatas dijelaskan sebelumnya gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang menjadi pelayanan daerah adalah :

A. Pelayanan Publik

1. Pelayanan AK-I (Kartu pencari kerja);
2. Pelayanan BKK (Bursa Kerja Khusus);
3. Pelayanan rekomendasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
4. Pelayanan Rekomendasi Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
- ;

B. Pembangunan bidang Ketenagakerjaan Kota Cilegon

1. Pelayanan Pelatihan Kerja
2. Pelayanan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Pelayanan Informasi Pasar Kerja
4. Pelayanan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
5. Pelayanan Pemagangan
6. Pelayanan Sertifikasi Kompetensi
7. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

8. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek/BPJS
9. Pelayanan pendaftaran pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

Melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

- a. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan kemampuan pencari kerja
- b. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
- c. Meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategi dapat ditempuh melalui :

1. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja melalui pelatihan
2. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal
3. Meningkatkan kecepatan penyelesaian ketenagakerjaan dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan strategi :

- a. Meningkatkan keterampilan pencari kerja
- b. Mengembangkan system informasi pasar kerja
- c. Meningkatkan ketenangan dan kemajuan berusaha

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja kota Cilegon

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Mencermati penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon periode RPJMD Tahun 2021-2026, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mempunyai tugas untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 (empat) RPJMD Kota Cilegon yang berbunyi: “ **Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata**”

Adapun Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang merupakan penjabaran dari Misi ke-4 (empat) pada RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur”. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yaitu :
 - Nilai Lakip Perangkat Daerah
 - Indeks RB Perangkat Daerah
 - Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)
2. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.
Tujuan ini dijabarkan ke dalam Sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” adapun indikatornya yaitu “Tingkat Penempatan Tenaga Kerja”

Adapun pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026, terdapat penyesuaian / perubahan pada target sasaran “pertumbuhan realisasi retribusi” pada tahun 2023-2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Renstra 2021-2026 Pada Tahun Ke						Perubahan Target Kinerja Tujuan Sasaran Renstra 2021-2026 Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas layanan pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	62,97 (B)	71,2 (BB)	75,3 (BB)	78 (BB)	82,2 (A)	84,2 (A)	62,97 (B)	71,2 (BB)	75,3 (BB)	78 (BB)	82,2 (A)	84,2 (A)
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,2 (Poin)	70,02 (Poin)	70,75 (Poin)	71,75 (Poin)	72,75 (Poin)	73 (Poin)	69,2 (Poin)	70,02 (Poin)	70,75 (Poin)	71,75 (Poin)	72,75 (Poin)	73 (Poin)
			Indeks RB Perangkat Daerah	53,80 (Poin)	55,80 (Poin)	57,8 (Poin)	60 (Poin)	62 (Poin)	64 (Poin)	53,80 (Poin)	55,80 (Poin)	57,8 (Poin)	60 (Poin)	62 (Poin)	64 (Poin)
			Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5 %	5 %	5%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	65 (Poin)	67 (Poin)	69 (Poin)	70 (Poin)	72 (Poin)	74 (Poin)	65 (Poin)	67 (Poin)	69 (Poin)	70 (Poin)	72 (Poin)	74 (Poin)
2	Pemerataan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka	11,9%	11,16%	10,46%	9,81%	9,19%	8,62%	11,9%	11,16%	10,46%	9,81%	9,19%	8,62%
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Adapun Strategi Dinas Tenaga Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai strategi “meningkatkan kualitas pelayanan publik”, dilakukan dengan arah kebijakan :

- Pengintegrasian layanan dalam satu atap, mengelola pengaduan secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan serta mengukur kepuasan masyarakat secara berkala beserta tindak lanjutnya.

2. Meningkatkan pengelolaan angkatan dan tenaga kerja daerah

Untuk mencapai strategi “meningkatkan pengelolaan angkatan dan tenaga kerja daerah” dilakukan dengan arah kebijakan :

- Peningkatan kualitas layanan informasi ketenagakerjaan
- Peningkatan dukungan sarpras, kurikulum pelatihan, sertifikasi pelatihan serta pemagangan
- Peningkatan kualitas hubungan industrial

Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 yang disusun sesuai format tabel T-C 26 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”			
MISI 1 : Menghadirkan Pemerintah Daerah yang Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pengintegrasian layanan dalam satu atap, mengelola pengaduan secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan serta mengukur kepuasan masyarakat secara berkala beserta tindak lanjutnya
MISI 4 : Mewujudkan kesejahteraan yang merata			
Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatkan pengelolaan angkatan dan tenaga kerja daerah	Peningkatan kualitas layanan informasi ketenagakerjaan
			Peningkatan dukungan sarpras, kurikulum pelatihan, sertifikasi pelatihan serta pemagangan
			Peningkatan kualitas hubungan industrial

BAB VI

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menjabarkan visi , misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026, maka pada Bab VI ini akan akan dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2021 – 2026. Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Cilegon.

Secara lebih rinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel 6.1 sesuai dengan format tabel T-C 27 dibawah ini :

Tabel 6.1

[illegible]

	TIDAK MEMILIKI SASARAN																		
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,02 poin	70,02 poin	9.539.209.888	70,75 poin	9.971.635.212	71,75 poin	10.539.691.953	72,75 poin	10.779.798.860	73 poin	10.976.761.739	73 poin	73.760.621.130	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	31.711.528	100 %	33.297.104	100 %	34.961.960	100 %	36.710.058	100 %	38.545.560	100 %	252.317.330	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10580000	3 Dokumen	16.711.600	3 Dokumen	17.547.180	3 Dokumen	18.424.539	3 Dokumen	19.345.766	3 Dokumen	20.313.054	15 Dokumen	132.968.247	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman	
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.999.928	1 Laporan	15.749.924	1 Laporan	16.537.421	1 Laporan	17.364.292	1 Laporan	18.232.506	5 Laporan	119.349.083	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.901.101.138	100 %	7.148.592.419	100 %	7.407.214.556	100 %	7.677.506.680	100 %	7.722.354.953	%	52.301.479.652	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6103514871	12 Orang/bulan	6.748.557.238	12 Orang/bulan	6.988.421.324	12 Orang/bulan	7.239.034.906	12 Orang/bulan	7.500.918.048	12 Orang/bulan	7.536.936.889	60 Orang/bulan	51.087.742.183	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman	
		2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4343 Dokumen	358 Dokumen	143.496.000	358 Dokumen	150.670.800	358 Dokumen	158.204.340	358 Dokumen	166.114.557	358 Dokumen	174.420.285	1.790 Dokumen	1.141.746.552	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.191.500	1 Laporan	4.401.075	1 Laporan	4.621.129	1 Laporan	4.852.185	1 Laporan	5.094.794	5 Laporan	33.350.271	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman

		2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.856.400	1 Laporan	5.099.220	1 Laporan	5.354.181	1 Laporan	5.621.890	1 Laporan	5.902.985	5 Laporan	38.640.646	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	81 Paket	-	81 Paket	-	81 Paket	-	81 Paket	-	81 Paket	-	405 Paket	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	271.689.086	100 %	285.273.541	100 %	299.537.217	100 %	314.514.078	100 %	330.239.782	%	2.161.733.268	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	83.139.612	30 Paket	87.296.593	30 Paket	91.661.422	30 Paket	96.244.493	30 Paket	101.056.718	150 Paket	661.512.274	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30371135	24 Paket	-	24 Paket	-	24 Paket	-	24 Paket	-	24 Paket	-	120 Paket	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	44.991.474	11 Paket	47.241.048	11 Paket	49.603.100	11 Paket	52.083.255	11 Paket	54.687.418	55 Paket	357.981.131	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	-	12 Paket	-	12 Paket	-	12 Paket	-	12 Paket	-	60 Paket	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman

		2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.010.000	5 Dokumen	1.060.500	5 Dokumen	1.113.525	5 Dokumen	1.169.201	5 Dokumen	1.227.661	25 Dokumen	8.036.209	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	142.548.000	24 Laporan	149.675.400	24 Laporan	157.159.170	24 Laporan	165.017.129	24 Laporan	173.267.985	120 Laporan	1.134.203.654	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	-	100	100.000.000	100	330.000.000	100	100.000.000	100	170.000.000		1.040.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit	230.000.000	0 Unit	-	0 Unit	50.000.000	8 Unit	380.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	53 Unit	-	70 Unit	100.000.000	48 Unit	50.000.000	48 Unit	50.000.000	48 Unit	50.000.000	267 Unit	350.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	22 Unit	-	22 Unit	-	22 Unit	50.000.000	22 Unit	50.000.000	22 Unit	70.000.000	110 Unit	310.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.690.580.506	100 %	1.775.109.531	100 %	1.863.865.008	100 %	1.957.058.258	100 %	1.954.911.171	%	13.151.346.816	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	419.995.200	36 Laporan	440.994.960	36 Laporan	463.044.708	36 Laporan	486.196.943	36 Laporan	510.506.791	180 Laporan	3.341.752.184	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	10 Laporan	2.750.000	10 Laporan	2.887.500	10 Laporan	3.031.875	10 Laporan	3.183.469	10 Laporan	3.342.642	50 Laporan	21.880.770	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	780 Laporan	1.228 Laporan	1.267.835.306	1.228 Laporan	1.331.227.071	1.228 Laporan	1.397.788.425	1.228 Laporan	1.467.677.846	1.228 Laporan	1.441.061.738	6.140 Laporan	9.787.713.862	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman

		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	644.127.630	100 %	629.362.617	100 %	604.113.212	100 %	694.009.786	100 %	760.710.273	%	4.853.744.064	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	134.486.500	4 Unit	141.210.825	4 Unit	148.271.366	4 Unit	155.684.935	4 Unit	163.469.181	20 Unit	1.070.061.169	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	221.624.200	18 Unit	232.705.410	18 Unit	200.865.137	18 Unit	256.557.715	18 Unit	269.385.600	90 Unit	1.719.909.262	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161 Unit	190 Unit	182.829.900	190 Unit	145.000.000	190 Unit	139.008.008	190 Unit	160.000.000	190 Unit	200.000.000	950 Unit	1.226.837.908	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2376 Unit	546 Unit	105.187.030	0 Unit	110.446.382	0 Unit	115.968.701	0 Unit	121.767.136	0 Unit	127.855.492	546 Unit	836.935.725	DINAS TENAGA KERJA	Kedalaman
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	50 %	60 %	6.800.000.000	65 %	13.140.000.000	70 %	11.350.000.000	75 %	7.000.000.000	80 %	3.000.000.000	80 %	47.290.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapatkan pembinaan		70 %		70 %		70 %		70 %		70 %		%			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100 %	100 %	6.800.000.000	100 %	13.140.000.000	100 %	11.350.000.000	100 %	7.000.000.000	100 %	3.000.000.000	%	47.290.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	750 Orang	2.000 Orang	6.800.000.000	2.000 Orang	7.000.000.000	2.000 Orang	7.000.000.000	2.000 Orang	7.000.000.000	2.000 Orang	3.000.000.000	2.000 Orang	36.800.000.000	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON

		2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	0 Unit	-	1 Unit	6.140.00 0.000	315 Unit	4.350.000.0 00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	10.490.0 00.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedal eman
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0	20 Lembaga	-	20 Lembaga	-	20 Lembaga	-	20 Lembaga	-	20 Lembaga	-	100 Lembaga	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30 %	30 %	4.030.0 00.000	30 %	4.031.50 0.000	30 %	3.963.075.0 00	30 %	4.034.72 8.750	30 %	36.465.1 88	%	16.168.6 99.314	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.930.0 00.000	100 %	3.930.00 0.000	100 %	3.930.000.0 00	100 %	3.930.00 0.000	100 %	-	%	15.720.0 00.000	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	45 Orang	500 Orang	3.930.0 00.000	500 Orang	3.930.00 0.000	500 Orang	3.930.000.0 00	500 Orang	3.930.00 0.000	500 Orang	-	500 Orang	15.720.0 00.000	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 Orang	300 Orang	-	400 Orang	-	400 Orang	-	400 Orang	-	400 Orang	-	400 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
		2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	0	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	100 %	70.000. 000	100 %	70.000.0 00	100 %	-	100 %	70.000.0 00	100 %	-	%	210.000. 000	DINAS TENAGA KERJA	

		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	30 Orang	1.530 Orang	70.000.000	1.530 Orang	70.000.000	1.530 Orang	-	1.530 Orang	70.000.000	1.530 Orang	-	1.530 Orang	210.000.000	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	10 Orang	20 Orang	-	20 Orang	-	20 Orang	-	20 Orang	-	20 Orang	-	20 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	300 Orang	600 Orang	-	600 Orang	-	600 Orang	-	600 Orang	-	600 Orang	-	600 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	30.000.000	100 %	31.500.000	100 %	33.075.000	100 %	34.728.750	100 %	36.465.188	%	238.699.314	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	30	30.000.000	30	31.500.000	30	33.075.000	30	34.728.750	30	36.465.188	30	238.699.314	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	659251771	80 %	470.000.000	80 %	440.471.394	80 %	364.212.500	80 %	495.732.210	80 %	523.518.824	80 %	3.340.972.576	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS TENAGA KERJA	

			Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	100 Perusahaan	-	100 Perusahaan	-	100 Perusahaan	-	100 Perusahaan	-	100 Perusahaa n	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	470.000 .000	100 %	440.471. 394	100 %	364.212.50 0	100 %	495.732. 210	100 %	523.518. 824	100 %	3.340.97 2.576	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	50 Perkara	400.000 .000	50 Perkara	366.971. 394	50 Perkara	325.625.00 0	50 Perkara	414.698. 460	50 Perkara	440.976. 104	50 Perkara	2.830.22 3.166	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	280 Perkara	280 Perkara	35.000. 000	280 Perkara	36.750.0 00	280 Perkara	38.587.500	280 Perkara	40.516.8 75	280 Perkara	42.542.7 19	280 Perkara	278.482. 532	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	35.000. 000	1 Lembaga	36.750.0 00	1 Lembaga	-	1 Lembaga	40.516.8 75	1 Lembaga	40.000.0 01	1 Lembaga	232.266. 878	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON

Tabel 6.1 (T-C. 27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON
RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2021 -2026 (PERUBAHAN)

T u j u a n	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana a n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
T1.1 Peningkatan layanan pemerintahan																			
				T1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	62.97 poin	71,2 poin		75,3 poin		78 poin		82,2 poin		84,2 poin		84,2 poin		DINAS TENAGA KERJA	
S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur																		DINAS TENAGA KERJA	
				Nilai Lakip Perangkat Daerah		70,02 poin		70,75 poin		71,75 poin		72,75 poin		73 poin		73 poin		DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		70,02 poin	8.337.306.488	70,75 poin	9.971.635.212	71,75 poin	10.539.691.953	72,75 poin	10.779.798.860	73 poin	10.976.761.739	73 poin	10.976.761.739	DINAS TENAGA KERJA	
				Indeks RB Perangkat Daerah		55,8 poin		57,8 poin		60 poin		62 poin		64 poin		64 poin			
				Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)		100 %		5 %		5 %		5 %		100 %		100 %			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)		67 poin		69 poin		70 poin		72 poin		74 poin		74 poin			
2.07.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan / Dokumen	30.951.700	3 Laporan / Dokumen	33.297.104	3 Laporan / Dokumen	34.961.960	3 Laporan / Dokumen	36.710.058	3 Laporan / Dokumen	38.545.560	3 Laporan / Dokumen	38.545.560	DINAS TENAGA KERJA	

		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%			
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.991.000	2 Dokumen	17.547.180	2 Dokumen	18.424.539	2 Dokumen	19.345.766	2 Dokumen	20.313.054	2 Dokumen	20.313.054	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	14.960.700	1 Laporan	15.749.924	1 Laporan	16.537.421	1 Laporan	17.364.292	1 Laporan	18.232.506	5 Laporan	18.232.506	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0 Laporan / Dokumen	5.329.847.278	5 Laporan / Dokumen	7.148.592.419	5 Laporan / Dokumen	7.408.714.556	5 Laporan / Dokumen	7.679.006.680	5 Laporan / Dokumen	7.723.854.953	5 Laporan / Dokumen	7.723.854.953	DINAS TENAGA KERJA	
		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %			
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Orang/bulan	5.221.051.878	30 Orang/bulan	6.988.421.324	30 Orang/bulan	7.239.034.906	30 Orang/bulan	7.500.918.048	30 Orang/bulan	7.536.936.889	132 Orang/bulan	7.536.936.889	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		84 Dokumen	99.455.000	12 Dokumen	150.670.800	12 Dokumen	158.204.340	12 Dokumen	166.114.557	12 Dokumen	174.420.285	12 Dokumen	174.420.285	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3.765.400	1 Laporan	4.401.075	1 Laporan	4.621.129	1 Laporan	4.852.185	1 Laporan	5.094.794	5 Laporan	5.094.794	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman

		2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	4.140.000	2 Laporan	5.099.220	2 Laporan	5.354.181	2 Laporan	5.621.890	2 Laporan	5.902.985	9 Laporan	5.902.985	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1.435.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0 Laporan / Dokumen	-	1 Laporan / Dokumen	-	1 Laporan / Dokumen	-	1 Laporan / Dokumen	-	1 Laporan / Dokumen	-	1 Laporan / Dokumen	-	DINAS TENAGA KERJA	
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%			
		2.07.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	-	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA	

			Jumlah Paket Pakaian Dinas		0 Laporan /		4 Laporan /		4 Laporan /		4 Laporan /		4 Laporan /		4 Laporan /			
			beserta Atribut Kelengkapan		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket	-	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	DINAS	TENAGA	KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0 Laporan / Dokumen	353.393.290	7 Laporan / Dokumen	308.609.097	7 Laporan / Dokumen	414.389.201	7 Laporan / Dokumen	338.014.078	7 Laporan / Dokumen	323.739.782	7 Laporan / Dokumen	323.739.782	DINAS	TENAGA	KERJA
		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%				
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25 Paket	40.923.843	1 Paket	36.622.888	1 Paket	53.661.422	1 Paket	42.478.871	1 Paket	45.556.718	1 Paket	45.556.718	DINAS	TENAGA	KERJA
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		46 Paket	44.820.188	1 Paket	52.587.529	1 Paket	48.965.509	1 Paket	40.771.364	1 Paket	49.271.364	1 Paket	49.271.364	DINAS	TENAGA	KERJA
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		21 Paket	18.171.920	1 Paket	22.727.945	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	25 Paket	25.000.000	DINAS	TENAGA	KERJA

[illegible]

				Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														KERJA	
		2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	-	0 Unit	-	4 Unit	108.648.016	1 Unit	10.000. 000	1 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000. 000	DINAS TENAGA KERJA	Kedale man
		2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		69 Unit	169.785 .600	4 Unit	20.000.00 0	20 Unit	50.000.000	10 Unit	30.000. 000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	50.000. 000	DINAS TENAGA KERJA	Kedale man
		2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		33 Unit	166.707 .399	0 Unit	-	15 Unit	50.000.000	7 Unit	30.000. 000	20 Unit	70.000.000	20 Unit	70.000. 000	DINAS TENAGA KERJA	Kedale man
		2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	39.004. 713	4 Unit	37.740.00 0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedale man
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0 Laporan / Dokumen	1.766.1 90.215	3 Laporan / Dokume n	1.863.127. 983	3 Laporan / Dokumen	1.863.865.00 8	3 Laporan / Dokumen	1.957.0 58.258	3 Laporan / Dokumen	1.954.911. 171	3 Laporan / Dokumen	1.954.9 11.171	DINAS TENAGA KERJA	

	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		36 Laporan	327.339.395	12 Laporan	400.994.960	12 Laporan	463.044.708	12 Laporan	486.196.943	12 Laporan	510.506.791	12 Laporan	510.506.791	DINAS	Kedaleman
			dan Listrik yang Disediakan														TENAGA	
	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	-	1 Laporan	2.887.500	1 Laporan	3.031.875	1 Laporan	3.183.469	1 Laporan	3.342.642	1 Laporan	3.342.642	DINAS	Kedaleman
																	TENAGA	
																	KERJA	
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	1.438.850.820	12 Laporan	1.459.245.523	12 Laporan	1.397.788.425	12 Laporan	1.467.677.846	12 Laporan	1.441.061.738	12 Laporan	1.441.061.738	DINAS	Kedaleman
																	TENAGA	
																	KERJA	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dihasilkan		0 Unit	481.426.293	70 Unit	555.268.609	87 Unit	604.113.212	176 Unit	694.009.786	124 Unit	760.710.273	124 Unit	760.710.273	DINAS	
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%			
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		4 Unit	78.366.125	4 Unit	173.328.277	4 Unit	148.271.366	4 Unit	155.684.935	4 Unit	163.469.181	20 Unit	163.469.181	DINAS	Kedaleman	
																TENAGA		

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													KERJA	
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas		18 Unit	86.701.600	14 Unit	181.650.634	14 Unit	200.865.137	16 Unit	256.557.715	17 Unit	269.385.600	17 Unit	269.385.600	DINAS	Kedaleman
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		122 Unit	174.415.428	50 Unit	99.880.924	66 Unit	139.008.008	100 Unit	160.000.000	150 Unit	200.000.000	150 Unit	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		110 Unit	141.943.140	2 Unit	100.408.774	3 Unit	115.968.701	4 Unit	121.767.136	5 Unit	127.855.492	5 Unit	127.855.492	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
			Indeks RB Perangkat Daerah		55,8 poin		57,8 poin		60 poin		62 poin		64 poin		64 poin		DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah		70,02 poin	8.337.306.488	70,75 poin	9.971.635.212	71,75 poin	10.539.691.953	72,75 poin	10.779.798.860	73 poin	10.976.761.739	73 poin	10.976.761.739	DINAS TENAGA KERJA	
			Indeks RB Perangkat Daerah		55,8 poin		57,8 poin		60 poin		62 poin		64 poin		64 poin			
			Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)		100 %		5 %		5 %		5 %		100 %		100 %			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		67 poin		69 poin		70 poin		72 poin		74 poin		74 poin			

				(OPD Pelayanan Publik)																
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		0 Laporan / Dokumen	30.951.700	3 Laporan / Dokumen	33.297.104	3 Laporan / Dokumen	34.961.960	3 Laporan / Dokumen	36.710.058	3 Laporan / Dokumen	38.545.560	3 Laporan / Dokumen	38.545.560	DINAS TENAGA		
				Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan													KERJA			
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%				
		2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.991.000	2 Dokumen	17.547.180	2 Dokumen	18.424.539	2 Dokumen	19.345.766	2 Dokumen	20.313.054	2 Dokumen	20.313.054		DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	14.960.700	1 Laporan	15.749.924	1 Laporan	16.537.421	1 Laporan	17.364.292	1 Laporan	18.232.506	5 Laporan	18.232.506		DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0 Laporan / Dokumen	5.329.847.278	5 Laporan / Dokumen	7.148.592.419	5 Laporan / Dokumen	7.408.714.556	5 Laporan / Dokumen	7.679.006.680	5 Laporan / Dokumen	7.723.854.953	5 Laporan / Dokumen	7.723.854.953	DINAS TENAGA KERJA		
				Rata-rata capaian kinerja sub		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %						

			kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Orang/bulan	5.221.051.878	30 Orang/bulan	6.988.421.324	30 Orang/bulan	7.239.034.906	30 Orang/bulan	7.500.918.048	30 Orang/bulan	7.536.936.889	132 Orang/bulan	7.536.936.889	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		84 Dokumen	99.455.000	12 Dokumen	150.670.800	12 Dokumen	158.204.340	12 Dokumen	166.114.557	12 Dokumen	174.420.285	12 Dokumen	174.420.285	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3.765.400	1 Laporan	4.401.075	1 Laporan	4.621.129	1 Laporan	4.852.185	1 Laporan	5.094.794	5 Laporan	5.094.794	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	4.140.000	2 Laporan	5.099.220	2 Laporan	5.354.181	2 Laporan	5.621.890	2 Laporan	5.902.985	9 Laporan	5.902.985	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan		1 Dokumen	1.435.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	DINAS	Kedaleman

		Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														TENAGA KERJA	
2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan		0 Laporan /	-	1 Laporan /	-	1 Laporan /	-	1 Laporan /	-	1 Laporan /	-	1 Laporan /	-	DINAS		
	Kewenangan Perangkat Daerah	Retribusi Daerah		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		TENAGA KERJA		
		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%				
2.07.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	-	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	0 %	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Laporan / Dokumen		4 Laporan / Dokumen		4 Laporan / Dokumen		4 Laporan / Dokumen		4 Laporan / Dokumen		4 Laporan / Dokumen				
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0 Paket	-	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedale man	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada		0 Laporan /	353.393 .290	7 Laporan /	308.609.0 97	7 Laporan /	414.389.201	7 Laporan /	338.014 .078	7 Laporan /	323.739.7 82	7 Laporan /	323.739 .782	DINAS		

				Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		TENAGA KERJA	
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%			
		2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25 Paket	40.923.843	1 Paket	36.622.888	1 Paket	53.661.422	1 Paket	42.478.871	1 Paket	45.556.718	1 Paket	45.556.718	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		46 Paket	44.820.188	1 Paket	52.587.529	1 Paket	48.965.509	1 Paket	40.771.364	1 Paket	49.271.364	1 Paket	49.271.364	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		21 Paket	18.171.920	1 Paket	22.727.945	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	25 Paket	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	57.012.113	1 Paket	42.947.678	1 Paket	89.603.100	1 Paket	49.763.843	1 Paket	43.911.700	15 Paket	43.911.700	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		11 Paket	35.124.000	1 Paket	45.455.890	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan		5 Dokumen	24.150.000	12 Dokumen	13.636.767	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	53 Dokumen	15.000.000	DINAS TENAGA	Kedaleman

				Perundang-Undangan yang Disediakan													KERJA	
		2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	24 Laporan	133.191 .226	12 Laporan	94.630.40 0	12 Laporan	157.159.170	12 Laporan	140.000 .000	12 Laporan	120.000.00 0	12 Laporan	120.000 .000	DINAS	Kedaleman
			Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													TENAGA KERJA	
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	375.497 .712	8 Unit	57.740.00 0	39 Unit	208.648.016	18 Unit	70.000. 000	41 Unit	170.000.0 00	41 Unit	170.000 .000	DINAS TENAGA KERJA	
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		%			
		2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	4 Unit	108.648.016	1 Unit	10.000. 000	1 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000. 000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	69 Unit	169.785 .600	4 Unit	20.000.00 0	20 Unit	50.000.000	10 Unit	30.000. 000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	50.000. 000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman

	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		33 Unit	166.707.399	0 Unit	-	15 Unit	50.000.000	7 Unit	30.000.000	20 Unit	70.000.000	20 Unit	70.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	39.004.713	4 Unit	37.740.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0 Laporan / Dokumen	1.766.190.215	3 Laporan / Dokumen	1.863.127.983	3 Laporan / Dokumen	1.863.865.008	3 Laporan / Dokumen	1.957.058.258	3 Laporan / Dokumen	1.954.911.171	3 Laporan / Dokumen	1.954.911.171	DINAS TENAGA KERJA	
			Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %			
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	327.339.395	12 Laporan	400.994.960	12 Laporan	463.044.708	12 Laporan	486.196.943	12 Laporan	510.506.791	12 Laporan	510.506.791	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	-	1 Laporan	2.887.500	1 Laporan	3.031.875	1 Laporan	3.183.469	1 Laporan	3.342.642	1 Laporan	3.342.642	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman

		2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	1.438.850.820	12 Laporan	1.459.245.523	12 Laporan	1.397.788.425	12 Laporan	1.467.677.846	12 Laporan	1.441.061.738	12 Laporan	1.441.061.738	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dihasilkan		0 Unit	481.426.293	70 Unit	555.268.609	87 Unit	604.113.212	176 Unit	694.009.786	124 Unit	760.710.273	124 Unit	760.710.273	DINAS TENAGA KERJA	
				Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		0 %		0 %		0 %		%					
		2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	78.366.125	4 Unit	173.328.277	4 Unit	148.271.366	4 Unit	155.684.935	4 Unit	163.469.181	20 Unit	163.469.181	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit	86.701.600	14 Unit	181.650.634	14 Unit	200.865.137	16 Unit	256.557.715	17 Unit	269.385.600	17 Unit	269.385.600	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		122 Unit	174.415.428	50 Unit	99.880.924	66 Unit	139.008.008	100 Unit	160.000.000	150 Unit	200.000.000	150 Unit	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
		2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		110 Unit	141.943.140	2 Unit	100.408.774	3 Unit	115.968.701	4 Unit	121.767.136	5 Unit	127.855.492	5 Unit	127.855.492	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman
T4.1 Pemerataan kesejahteraan masyarakat																			
				T4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka		11,16 %		10,46 %		9,81 %		9,19 %		8,62 %		8,62 %		DINAS TENAGA KERJA	

S4.1.2 Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat																DINAS TENAGA KERJA		
			S4.1.2.1 Tingkat Penempatan Tenaga Kerja		30 %		30 %		30 %		30 %		30 %		%		DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		60 %	4.517.507.638	50 %	13.140.000.000	50 %	11.450.000.000	50 %	7.100.000.000	80 %	3.000.000.000	80 %	3.000.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapatkan pembinaan		70 %		70 %		70 %		70 %							
			Persentase Perusahaan Kecil / UKM yang Meningkatkan Produktivitasnya		%		%		25 %		25 %		25 %					
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100 %	4.517.507.638	0 %	13.110.000.000	0 %	11.320.000.000	0 %	6.970.000.000	0 %	3.000.000.000	0 %	3.000.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		0 Laporan / Dokumen		2 Laporan / Dokumen		2 Laporan / Dokumen		1 Laporan / Dokumen		1 Laporan / Dokumen		1 Laporan / Dokumen			
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		1.172 Orang	4.517.507.638	920 Orang	7.000.000.000	1.104 Orang	7.000.000.000	1.104 Orang	6.970.000.000	2.000 Orang	3.000.000.000	2.000 Orang	3.000.000.000	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		0 Unit	-	1 Unit	6.110.000.000	315 Unit	4.320.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	DINAS TENAGA KERJA	Kedaleman

		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		100 %	-	0 %	30.000.000	0 %	30.000.000	0 %	30.000.000	0 %	-	0 %	-	DINAS TENAGA KERJA	
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		0 Laporan / Dokumen		20 Laporan / Dokumen		20 Laporan / Dokumen		20 Laporan / Dokumen		0 Laporan / Dokumen		0 Laporan / Dokumen			
		2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		0 Lembaga	-	20 Lembaga	30.000.000	20 Lembaga	30.000.000	20 Lembaga	30.000.000	0 Lembaga	-	60 Lembaga	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas		0 Perusahaan/ U KM/IKM	-	0 Perusahaan/ U KM/IKM	-	20 Perusahaan/ U KM/IKM	50.000.000	20 Perusahaan/ U KM/IKM	50.000.000	0 Perusahaan/ U KM/IKM	-	0 Perusahaan/ UKM/IKM	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	20 Perusahaan	50.000.000	20 Perusahaan	50.000.000	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		0 Laporan / Dokumen	-	0 Laporan / Dokumen	-	1 Laporan / Dokumen	50.000.000	1 Laporan / Dokumen	50.000.000	0 Laporan / Dokumen	-	0 Laporan / Dokumen	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja		30 %	985.188.167	30 %	4.031.500.000	30 %	3.863.075.000	30 %	3.934.728.750	30 %	36.465.188	30 %	36.465.188	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	814.728.420	0 %	3.900.000.000	0 %	3.205.000.000	0 %	3.375.000.000	0 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA	

				Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		0 Laporan / Dokumen		3 Laporan / Dokumen		3 Laporan / Dokumen		3 Laporan / Dokumen		3 Laporan / Dokumen		3 Laporan / Dokumen			
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		2.000 Orang	769.303 .230	2.000 Orang	3.800.000. 000	2.000 Orang	2.805.000.00 0	2.000 Orang	2.975.0 00.000	2.000 Orang	-	2.000 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON		
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		300 Orang	45.425. 190	300 Orang	100.000.0 00	300 Orang	100.000.000	300 Orang	100.000 .000	300 Orang	-	300 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON		
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		0 Orang	-	0 Orang	-	50 Orang	300.000.000	50 Orang	300.000 .000	0 Orang	-	0 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON		
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA			
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100 %	49.654. 951	0 %	100.000.0 00	0 %	125.000.000	0 %	125.000 .000	0 %	-	%	-	DINAS TENAGA KERJA			
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		0 Laporan / Dokumen		2 Laporan / Dokumen		2 Laporan / Dokumen		2 Laporan / Dokumen		2 Laporan / Dokumen							
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1.530 Orang	49.654. 951	5.000 Orang	70.000.00 0	5.000 Orang	95.000.000	6.000 Orang	95.000. 000	6.000 Orang	-	6.000 Orang	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON		

[illegible]

		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	-	36	31.500.000	36	33.075.000	36	34.728.750	36	36.465.188	36	36.465.188	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	80 %	499.464.000	80 %	440.471.394	80 %	364.212.500	80 %	495.732.210	80 %	523.518.824	80 %	523.518.824	DINAS TENAGA KERJA	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	DINAS TENAGA KERJA	
				Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	0 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	-	50 Perusahaan	-	50 Perusahaan	-	50 Perusahaan	-	50 Perusahaan	-	50 Perusahaan	-	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEGON
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	499.464.000	0 %	440.471.394	0 %	364.212.500	0 %	495.732.210	0 %	523.518.824	0 %	523.518.824	DINAS TENAGA KERJA	

			Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial		0 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus			
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		45 Perkara	436.684 .000	20 Perkara	366.971.3 94	20 Perkara	325.625.000	20 Perkara	414.698 .460	20 Perkara	440.976.10 4	20 Perkara	440.976 .104	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		280 Perkara	34.130. 000	20 Perkara	36.750.00 0	20 Perkara	38.587.500	20 Perkara	40.516. 875	20 Perkara	42.542.719	20 Perkara	42.542. 719	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	28.650. 000	1 Lembaga	36.750.00 0	1 Lembaga	-	1 Lembaga	40.516. 875	1 Lembaga	40.000.001	1 Lembaga	40.000. 001	DINAS TENAGA KERJA	KOTA CILEG ON

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Program prioritas pembangunan daerah Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 merupakan program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2021 – 2026. Pada tingkat Kota Cilegon terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan kegiatan prioritas.

Adapun Program dan Kegiatan Prioritas yang didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah :

1. P.P1 Peningkatan Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN
 - KP-6 25% kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN
2. P.P2 Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 - Peningkatan kualitas penerapan SAKIP
3. P.P8 Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
 - KP-1 Pelatihan, pemagangan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi
 - KP-2 Pengembangan BLK

Untuk lebih jelasnya mengenai Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sesuai dengan berlakunya Permendagri 90 tahun 2019 yang mengatur tentang keseragaman nomenklatur program, penyelarasan nomenklatur program sebagaimana diuraikan pada tabel 6.2 (T-C28) berikut ini :

Tabel 6.2 (T-C.28)
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON
RANCANGAN AWAL RENSTRA 2021 – 2026

Kode	Program / Kegiatan Prioritas		Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Pagu Indikatif 2022-2026
									2022	2023	2024	2025	2026	
									Target	Target	Target	Target	Target	
P.P1	Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN													
	KP-6	25% kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	42.117.383.275
P.P2	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	132.968.247
	KP-2	Peningkatan Kualitas Penerapan Sakip			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	1		119.349.083
P.P8	KP-1	Pelatihan, pemagangan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang diberikan pelatihan (UPT Latihan Kerja)	Orang / Peserta	750	2000	2000	2000	2000	2000	41.290.000.000
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja	Lembaga / Perusahaan	40	40	40	40	40	0	15.857.287.137
						Jumlah Pembinaan dan Monitoring TKA	Perusahaan	30	0	0	0	0	0	
						Jumlah peserta pemagangan Lulusan BLK dan Pemagangan Mandiri	Orang	45	500	500	500	500	0	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Perusahaan yang di Monitoring	Perusahaan	30	30	30	30	30	30	268.438.502
			Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan			Orang	0	1500	1500	1500	1500	1500		
			Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah perusahaan yang difasilitasi rekrutmen	Perusahaan	10	20	20	20	20	20	27.470.239	
	KP-2		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelatihan (UPT Latihan Kerja)	Unit / Set		-	-	315	-	-	10.490.000.000
						Jumlah Prasarana Pelatihan (UPT Latihan Kerja)	Unit			1	-	-	-	

Tabel 6.2 (T-C.28)
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON
RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2021 – 2026 (PERUBAHAN)

Kode	Program / Kegiatan Prioritas		Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Pagu Indikatif 2022-2026
									2022	2023	2024	2025	2026	
									Target	Target	Target	Target	Target	
P.P1	Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN													
	KP-6	25% kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	12 Bulan	30	30	30	30	30	34.486.363.045
P.P2	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	91.621.539
	KP-2	Peningkatan Kualitas Penerapan Sakip			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1		82.844.843	
P.P8	KP-1	Pelatihan, pemagangan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang / Peserta	750	1072	2000	1104	2000	2000	28.487.507.638
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1342	2000	2000	2000	2000	2000	15.857.287.137
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	-	300	300	300	300	300	345.425.190
					Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	-	-	-	50	50	50	600.000.000
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang		1530	5000	5000	6000	6000	309.654.951
					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	-	-	30	30	30	30	90.000.000
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	-	-	20	20	-	600.000.000
					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	-	-	-	20	20	-	300.000.000
	KP-2		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelatihan (UPT Latihan Kerja)	Unit / Set		-	-	315	-	-	10.430.000.000
					Jumlah Prasarana Pelatihan (UPT Latihan Kerja)	Unit			1	-	-	-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang Tercantum dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun pada Perubahan Renstra 2021 – 2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, terdapat penyesuaian / perubahan Indikator Kinerja (Program) sebagai mana tercantum pada tabel di 7.1 (T-C 28) dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

[illegible]

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari Visi Dinas, sebagai arah dan pedoman bagi Dinas dalam penyelenggaraan kewenangannya dibidang pembangunan ketenagakerjaan.

Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kota Cilegon Tahun 2021–2026, selanjutnya rancangan Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yaitu **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dan juga sebagaibahan acuan Dinas Tenaga Kerja untuk menyusun **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan ini mustahil dapat berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari semua personel Dinas dalam mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang pada hakikatnya menyangkut dan menyentuh harkat hidup masyarakat bawah (**grass root**) karena berbicara tentang tenaga kerja tidak lepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran yang saat ini menjadi masalah nasional yang sangat kompleks.

Dengan komitmen yang kuat dari semua personel di lingkungan internal Dinas serta dukungan dari pemerintah kota, lintas sektoral, LSM dan masyarakat, maka diharapkan dapat mewujudkan visi mulia :

“MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”

Meskipun hal ini sangat berat tapi bukan mustahil hal tersebut dapat terwujud di Kota Cilegon.

Cilegon, April 2023
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon


Drs. H. Panca N Widodo, M.Si
NIP. 19690907 198903 1 006

TABEL DEFINISI OPERASIONAL DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan	Satuan	Penjelasan / Rumus Formulasi Perhitungan
Peningkatan Layanan Pemerintahan					
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan tahun n-1)
			Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15% dan evaluasi internal 10% dan capaian kinerja 20% (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh surveyor dengan berpedoman pada permenpan RB nomor 14 tahun 2017. (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)

			Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Persen	$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ Ket : Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah X_t = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu X (t – 1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya
Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat		Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	Persen	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / magang dibagi jumlah pencari kerja terdaftar
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	(Jumlah pencari kerja yang diberikan pelatihan dibagi jumlah pencari kerja yang ikut seleksi pelatihan) x 100%
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan dan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	%	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan dan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	%	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	(Jumlah Pencari Kerja yang diterima kerja di perusahaan, magang di perusahaan, dan bekerja ke luar negeri dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%

		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	%	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	%	Jumlah Laporan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kota Cilegon	%	Jumlah Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kota Cilegon
		Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	(Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi Jumlah kasus yang tercatat) x 100%
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	%	Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	%	Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial